

**DISHARMONISASI PARTAI GERINDRA DENGAN PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA DI DPRD PROVINSI SUMATERA
BARAT
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

Oleh:

MUHAMMAD FAIZ AKBAR

1710833009



Pembimbing:

Dr. Aidinil Zetra, M.A

Andri Rusta, S.IP., M.PP

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

MUHAMMAD FAIZ AKBAR (1710833009) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 2024. Judul Skripsi: Disharmonisasi Partai Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Pembimbing I: Dr. Aidinil Zetra, M.A dan Pembimbing II: Andri Rusta, S.IP, M.PP.

Pada pemilu 2019 hadir 2 koalisi besar yang dimana Partai Gerindra dan PKS berkoalisi dengan koalisi bersama PAN dan Demokrat serta Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai Calon Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024. Di Sumatera Barat sendiri, pasangan ini menjadi pemenang dengan 85,75% suara yang membuat suara partai yang mendukungnya melonjak. Partai Gerindra sendiri menjadi partai pemenang di periode 2019-2024 dengan 14 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat sementara PKS mendapatkan 10 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Partai Gerindra menguasai hampir seluruh posisi yang ada di AKD, sementara PKS hanya mendapatkan 2 posisi. Hal ini menyebabkan awal dari *disharmonisasi* yang terjadi diantara kedua partai tersebut dan menyebabkan *konflik politik*. Diawali dengan Hak Interplasi yang dilayangkan kepada Gubernur Sumatera Barat saat itu Irwan Prayitno. Hal ini menjadi awal *disharmonisasi* yang menyebabkan *konflik politik* bagi kedua partai tersebut. Pada Pilgub 2020, Gerindra memutuskan untuk menjadi partai penusung calon tunggal dan PKS berkoalisi dengan PPP. Hasilnya, PKS memenangkan kontestasi tersebut. *Konflik politik* kembali terjadi ketika adanya hak angket kepada Gubernur Sumbar serta puncak *konflik politik* dan *disharmonisasi* terjadi ketika rotasi AKD 2022-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terjadi konflik kepentingan yang dilandas Hak Interplasi F-Gerindra yang menjadi akar konflik kedua partai tersebut yang merupakan gabungan *kelompok semu*. Pasca konflik ini, Pilgub 2020 menjadi bukti nyata di publik bahwa Gerindra dan PKS sudah tidak sejalan lagi. Alhasil, berdampak hingga ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. *Konflik* yang terjadi berlandaskan *kelompok kepentingan* dan diawali Hak Angket yang dimana F-Gerindra mendukung penuh Hak Angket kepada Mahyeldi Ansharullah. Hingga puncaknya, pada *konflik politik* dengan *kelompok konflik* pada rotasi AKD 2022-2024, F-Gerindra meminta seluruh perwakilannya diimpahkan ke Komisi IV (Pembangunan). Namun, F-Gerindra memutuskan untuk mundur dan PKS menguasai AKD 2022-2024. Dari semua indikator *konflik politik* menurut *dahrenrof* tersebut, disimpulkan bahwa *disharmonisasi* Partai Gerindra dengan PKS di DPRD Provinsi Sumatera Barat memang nyata adanya hingga menyebabkan *konflik politik* yang mengakar.

Kata Kunci: Disharmonisasi, Konflik Politik, Partai Politik.

ABSTRACT

MUHAMMAD FAIZ AKBAR (1710833009) Department of Political Science, Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Andalas University, Padang 2024. Thesis title: Disharmonization of the Gerindra Party with the Prosperous Justice Party (PKS) in the DPRD of West Sumatra Province.

Advisor I: Dr. Aidinil Zetra, M.A and Advisor II: Andri Rusta, S.IP, M.PP.

. In the 2019 elections there were 2 large coalitions, where the Gerindra Party and PKS were in 1 coalition with PAN and the Democrats, namely the Red and White Coalition (KMP) which supported the pair Prabowo Subianto and Sandiaga Uno as Candidates for President and Vice President of the Republic of Indonesia for the 2019-2024 period. In West Sumatra itself, this pair became the winner with 85.75% of the vote, which made the votes of the parties supporting them soar. The Gerindra Party itself was the winning party in the 2019-2024 period with 14 seats in the West Sumatra Province DPRD while PKS won 10 seats in the West Sumatra Province DPRD. The Gerindra Party controls almost all the positions in AKD while PKS only gets 2 positions. This caused the beginning of disharmonization between the two parties and led to political conflict. Starting with the Right of Interplation which was conveyed to the Governor of West Sumatra at that time, Irwan Prayitno. This was the beginning of disharmony which led to political conflict for the two parties. In the 2020 gubernatorial election, Gerindra decided to become the party holding the sole candidate and PKS formed a coalition with PPP. As a result, PKS won the contest. Political conflict occurred again when there was a right to inquiry against the Governor of West Sumatra and the peak of political conflict and disharmonization occurred during the 2022-2024 AKD rotation. This study uses a qualitative method. The results of this research explain that there was a conflict of interest based on F-Gerindra's Interplation Rights which was the root of the conflict between the two parties which were a pseudogroup combination. After this conflict, the 2020 gubernatorial election became clear evidence to the public that Gerindra and PKS were no longer compatible. As a result, it had an impact down to the DPRD of West Sumatra Province. The conflict that occurred was based on interest groups in the Right to Inquiry, where F-Gerindra fully supported the Right to Inquiry for Mahyeldi Ansharullah. Until its peak, during the political conflict with conflict groups during the 2022-2024 AKD rotation, F-Gerindra asked that all of its representatives be delegated to Commission IV (Development). However, F-Gerindra decided to resign and PKS controlled AKD 2022-2024. From all the indicators of political conflict according to Dahlenrof, it was concluded that the disharmony between the Gerindra Party and PKS in the DPRD of West Sumatra Province was real and had caused deep-rooted political conflict.

Keywords: Disharmonization, Political Conflict, Political Parties